LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2022

INSPEKTORAT UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Inspektorat Utama Badan POM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Utama Badan POM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Inspektorat Utama Badan POM. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 26 Januari 2023
Inspektur Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
PernyataanTanggung Jawab
Ringkasan
- Laporan Realisasi Anggaran 6
- Neraca 7
- Laporan Operasional 8
- Laporan Perubahan Ekuitas 9
- Catatan atas Laporan Keuangan 10
  - Penjelasan Umum 10
  - Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 22
  - Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 31
  - Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 42
  - Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 49
  - Pengungkapan Penting Lainnya 53
- Lampiran dan Daftar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
GEDUNG MOZAIK Lt 2, JL. PERCETAKAN NEGARA NO 23 JAKARTA
TELEPON 021-4246726, FAXIMILE 021-4246726

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Utama Badan POM yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 26 Januari 2023
Inspektur Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Inspektorat Utama Badan POM Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp44.157.735,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp24.945.926.914,00 atau mencapai 99,82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp24.991.492.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.647.057.070,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp123.308.057,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.357.364.578,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp166.384.435,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.890.118,00 dan Rp1.644.166.952,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sebesar Rp1.312.000,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp25.157.225.002,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp25.155.913.002,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp42.845.735,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp25.113.067.267,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp1.644.910.156,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp25.113.067.267,00. dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai 0,00. Ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp25.112.324.063,00 dikurangi dengan Penurunan Ekuitas sebesar Rp743.204,00 sehingga Ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2022 adalah senilai Rp1.644.166.952,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022		% thd Angg	2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**B1**				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	44,157,735	0.00	6,756,746
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		**-**	**44,157,735**	**0.00**	**6,756,746**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	10,900,209,000	10,867,173,811	99.70	9,128,785,829
Belanja Barang	B.4	13,346,552,000	13,334,025,853	99.91	10,512,269,204
Belanja Modal	B.5	744,731,000	744,727,250	100.00	434,946,465
JUMLAH BELANJA		**24,991,492,000**	**24,945,926,914**	**99.82**	**20,076,001,498**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

II. NERACA

INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1.10	123,308,057	165,261,187
Jumlah Aset Lancar		123,308,057	165,261,187
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4,789,772,178	4,252,247,594
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	12,389,250	12,389,250
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(3,444,796,850)	(3,039,666,619)
Jumlah Aset Tetap		1,357,364,578	1,224,970,225
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.4	896,735,811	708,569,561
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(730,351,376)	(424,570,129)
Jumlah Aset Lainnya		166,384,435	283,999,432
JUMLAH ASET		**1,647,057,070**	**1,674,230,844**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	2,890,118	29,320,688
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2,890,118	29,320,688
JUMLAH KEWAJIBAN		2,890,118	29,320,688
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	1,644,166,952	1,644,910,156
JUMLAH EKUITAS		1,644,166,952	1,644,910,156
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1,647,057,070**	**1,674,230,844**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATAT
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1
JUMLAH PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban Pegawai	D.2
Beban Persediaan	D.3
Beban Barang dan Jasa	D.4
Beban Pemeliharaan	D.5
Beban Perjalanan Dinas	D.6
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9
JUMLAH BEBAN	
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	
POS LUAR BIASA	D.12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan
EKUITAS AWAL	E.1	1,644,910,156	1,938,805,227	(293,895,071)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(25,113,067,267)	(20,293,597,769)	(4,819,469,498)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(354,856)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	(354,856)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-	-
JUMLAH		**-**	**(354,856)**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	25,112,324,063	20,000,057,554	5,112,266,509
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(743,204)	(293,895,071)	
EKUITAS AKHIR	E.6	**1,644,166,952**	**1,644,910,156**	**(743,204)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

investigasi dan penyidikan;

i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap Pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Renstra diisi Inspektorat Utama Badan POM memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi diisi nama satker untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2019-2024 Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi Inspektorat Utama Badan POM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat *konsultatif* dan sebagai *quality assurance*. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan unit kerja di lingkungan Badan POM dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Pendekatan Penyusunan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Utama Badan POM Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Utama Badan POM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal 1n1 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan {SAP) yang Pererintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Utama Badan POM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Inspektorat Utama Badan POM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timhulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis helanja dan selanjutnya klasifikasi herdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas LaporanKeuangan

Persediaan

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

o Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:
-

Tabel I.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kriteria Kualitas Barang

Kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
    1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
        a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
        b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (Glassware) dan;
        c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
    2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
    3. Barang dalamproses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
    4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sesuai Perka Badan POM No. 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara material.

- Persediaan disajikan sebesar:

    1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:

        a. Harga pembelian

        b. Biaya pengangkutan

        c. Biaya penanganan

        d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.

    2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

        a. Potongan harga

        b. Rabat dan lainnya yang serupa

        c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.

    3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.

- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

meliputi:

1. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
   a. Alat gelas yang masih ada di Gudang
   b. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan
   c. Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih dalam keadaan baik
2. Alat gelas berupa alat ukur kualitatatif diantaranya:
   a. Alat yang masih ada di Gudang
   b. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  1. Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian
  2. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  3. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Pen

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Pada Tahun 2022, output yang telah dicapai oleh Inspektorat Utama Badan POM sebagai berikut :

Tabel 3.

Capaian Output Inpektorat Utama Badan POM Tahun 2022

No	Kode Output	Uuraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
			Rp.	Rp.	%	Laporan / layanan	Laporan / layanan	%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	4115.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	744.731.000	744.727.250	100,00	42	49	116,67
2	4115.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.823.231.000	12.823.152.216	100,00	1	1	100
3	4115.EBD.965	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	5.628.503.000	5.624.999.335	99,94	24	29	120,83
4	4116.EBD.965	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5.795.027.000	5.793.682.368	99,98	24	29	120,83

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Inspektorat Utama Badan POM telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 8 kali dengan perincian :

1. Revisi DIPA kewenangan kanwil DJPB (revisi halaman 3 dipa/rencana penarikan dana dan pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam satu KRO) sebanyak 5 kali, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Revisi DIPA kewenangan kanwil DJPB (10 Februari 2022) Revisi Administrasi dan Perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA
   b. Revisi DIPA kewenangan kanwil DJPB (11 April 2022) Revisi Administrasi dan Perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA
   c. Revisi DIPA kewenangan kanwil DJPB (12 Juli 2022) Revisi Administrasi dan Perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA
   d. Revisi DIPA kewenangan kanwil DJPB (12 Oktober 2022) Pergeseran Anggaran dalam hal Pagu Tetap dan Revisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Administrasi

- Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam satu Klasifikasi Rincian Output (KRO)
- Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA

e. Revisi DIPA kewenangan kanwil DJPB (17 November 2022) Pergeseran Anggaran dalam hal Pagu Tetap dan Revisi Administrasi

- Pergeseran anggaran antar jenis belanja
- Pergeseran anggaran antar jenis KRO
- Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA

2. Revisi DIPA kewenangan DJA (Pemotongan anggaran, penambahan belanja pegawai, penghapusan Automatic Adjustment) sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:
   a. Revisi DIPA kewenangan DJA (09 Juni 2022) Penambahan automatic adjustment (pencadangan anggaran) sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S-456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022,
   b. Revisi DIPA kewenangan DJA (22 Agustus 2022) Penambahan Belanja Pegawai. Inspektorat Utama memiliki kekurangan gaji dan tunjangan pada Tahun Anggaran (TA) 2022, sehingga dibutuhkannya tambahan anggaran untuk kekurangan tersebut.
   c. Revisi DIPA kewenangan DJA (04 Desember 2022) Penghapusan Automatic Adjustment. Inspektorat Utama melakukan pemotongan anggaran yang sebelumnya diblokir sehingga mengubah pagu satker menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

3. Revisi POK sebanyak 13 kali

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 4
Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	8,916,155,000	10,900,209,000
Belanja Barang	16,949,913,000	13,346,552,000
Belanja Modal	1,034,970,000	744,731,000
Jumlah Belanja	**26,901,038,000**	**24,991,492,000**

Realisasi Pendapatan Rp44.157.735,00

B.1 Pendapatan

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp44.157.735,00. Pendapatan Inspektorat Utama Badan POM terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	MAP		Uraian	Per 31 Desember 2022		
				Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
1	4251	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	42,086,701.00	0
2	4258	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1,312,000.00	0
2	4259	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	759,034.00	0
Jumlah Kotor				**-**	**44,157,735.00**	0
Pengembalian Pendapatan					-	0

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 226,77% dibandingkan TA 2021. Kenaikan/penurunan realisasi dimaksud, disebabkan pengembalian belanja TAYL dan pendapatan lainnya yang nominalnya tidak dapat ditentukan/direncanakan sebelumnya.

Tabel 6.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

URAIAN	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	42,086,701	4,555,555	823.85
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,312,000	6,756,746	-80.58
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	759,034	2,201,191	-65.52
Jumlah	**44,157,735**	**13,513,492**	**226.77**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Inspektorat Utama Badan POM TA 2022 merupakan Pendapatan dari :

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp42.086.701,00 terdiri dari:
    a) Penerimaan dari pelepasan aset non lancar berupa lelang BMN senilai Rp19.000.000,00 dengan NTPN No. 82F4F3CIF1A42NQV tanggal 4 Febuari 2022. Risalah Lelang No.63/28/2022 tanggal 2 Febuari 2022. Lelang BMN ini berupa 1 paket barang invetaris kantor yang terdiri dari Mesin Ketik, Alat Penghancur Kertas, Binding Machine, Slide Projector, Intermediate Telephone, Pesawat Telephone, PC, Notebook, Printer, Scanner, dan Hardisk Eksternal.
    b) Penerimaan dari pelepasan aset non lancar berupa lelang BMN senilai Rp23.086.701,00 dengan NTPN No. 5EEF20N9VIGMFV90 No. 525/28/2022 tanggal 2 Desember 2022. Risalah Lelang Nomor:525/28/2022. Lelang BMN ini berupa 1 paket barang invetaris kantor yang terdiri dari Notebook, Workstation, dan Meja Kayu.
2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp1.312.000,00 yang merupakan keleterlambatan atas pekerjaan kontrak Pengembangan Aplikasi SOLUSI sesuai de SPK No. PL.02.01.73.732.04.22.121 Tanggal 19 April 2022 berdasarkan Nomor SP2D. 221751302024346 pada tanggal 8 Agustus 2022.

3. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp759.034,00 terdiri dari :

Tabel 7.

Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

No	Uraian	No NTPN/No. SPM	Tanggal Setor	Jumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	Pengembalian Tukin Bulan Desember 2021	4A68E7QLU635V0G2	07/01/2022	161.228
2	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2021	6F72A3CIF177TV4F	07/01/2022	597.100
3	Pembulatan Untuk Kekurangan Gaji Bulan Oktober sd November Tahun 2021	SPM-433005-18135495	14/01/2022	228
4	Pembulatan untuk Kekurangan Gaji Induk Bulan Desember Tahun 2021 sd Februari Tahun 2022	SPM-433005-24686138	01/03/2022	478
	Jumlah			759.034

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp24.905.292.659,00

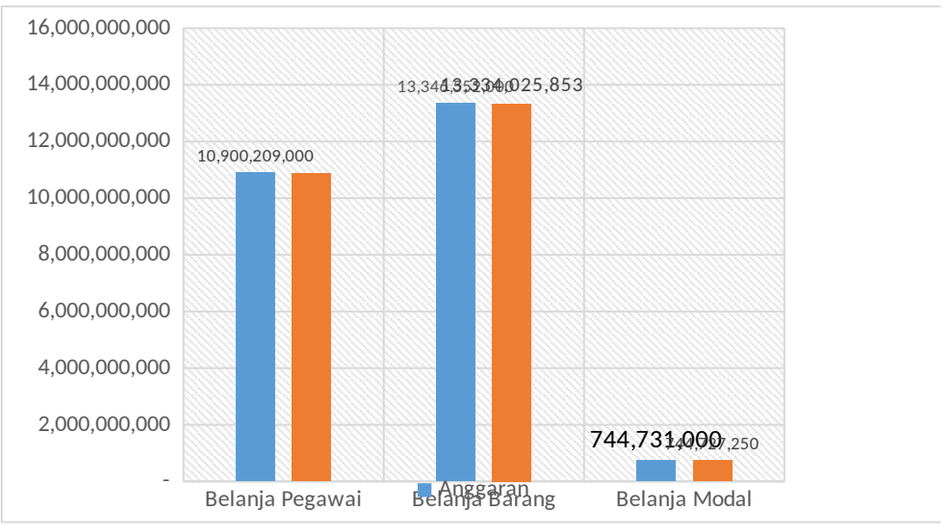
Realisasi Belanja TA 2022 adalah sebesar Rp24.905.292.659,00 atau 99,82% dari anggaran belanja sebesar Rp24.991.492.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10,900,209,000.00	10,867,173,811.00	99.70
Belanja Barang	13,346,552,000.00	13,334,025,853.00	99.91
Belanja Modal	744,731,000.00	744,727,250.00	100.00
Total Belanja Kotor	**24,991,492,000**	24,945,926,914.00	99.82
Pengembalian		40,634,255.00	-
Jumlah	**24,991,492,000**	**24,905,292,659**	99.66

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 24,26% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan anggaran tahun 2022 dari Rp20.095.728.000,00 menjadi Rp24.991.492.000,00 sehingga bertambah pula realisasi penyerapan belanjanya.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10,867,173,811	9,128,785,829	19.04
Belanja Barang	13,334,025,853	10,512,269,204	26.84
Belanja Modal	744,727,250	434,946,465	71.22
Jumlah	**24,945,926,914**	**20,076,001,498**	**24.26**

Belanja Pegawai Rp10.867.173.811,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.867.173.811,00 dan Rp9.128.785.829,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 19,04% persen untuk periode yang sama tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai Inspektorat Utama yang berakibat pada meningkatnya belanja pegawai dalam rangka mendukung program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

maupun kegiatan pengawasan, serta penyesuaian tunjangan kinerja pada level jabatan fungsional Auditor Muda dan Auditor Madya pada bulan desember.

	Akun	Keterangan	No SP2D	Jumlah
1.	511119	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan april sd Juli TA 2022. untuk 11 Pegawai/ 14 Jiwa	221751302028435	Rp600
2.	511119	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan Gaji tunjangan Fungsional bulan Januari 2021 sd Oktober 2022. untuk 1 pegawai/ 1 jiwa	221751302037490	Rp300
3.	511151	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan april sd Juli TA 2022. untuk 11 Pegawai/ 14 Jiwa	221751302028435	Rp5.475.000
4.	511123	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan Gaji tunjangan Fungsional bulan Januari 2021 sd Oktober 2022. untuk 1 pegawai/ 1 jiwa	221751302037490	Rp14.039.700
5.	511123	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan Februari 2021 sd Oktober 2022, untuk 1 pegawai/ 1 jiwa	221751302037491	Rp13.500.000
Jumlah				Rp27.539.700

Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,933,044,481	4,341,064,492	13.64
Belanja Lembur	21,400,000	33,117,000	(35.38)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus Kegiatan)	5,945,744,930	4,762,901,606	24.83
Jumlah Belanja Kotor	**10,900,189,411**	**9,137,083,098**	**19.30**
Pengembalian Belanja Pegawai	33,015,600	8,297,269	**297.91**
Jumlah Belanja	**10,867,173,811**	**9,128,785,829**	**19.04**

Pengembalian Belanja Pegawai Inspektorat Utama Badan POM merupakan pengembalian belanja yang terdiri dari:

Tabel 11. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp13.334.025.853,00

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.334.025.853,00 dan Rp10.512.269.204,00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 26,84% dari realisasi belanja barang TA 2021. Hal ini disebabkan meskipun masih dalam pandemi, kegiatan mulai awal tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berjalan sesuai perencanaan program pengawasan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Tabel 12.
Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

Akun	Uraian	No SPM	J
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	00692A	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	00693A	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	00685A	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	00131A	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	00248A	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	00216A	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	00100A	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	00576A	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	00126A	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	00224A	
Jumlah			

Pengembalian Belanja Barang Inspektorat Utama Badan POM merupakan pengembalian belanja yang terdiri dari:

Tabel 13.
Rincian Pengembalian Belanja Barang

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,007,266,601	2,113,288,817	(5.02)
Belanja Barang Non Operasional	864,721,885	785,073,715	10.15
Belanja Jasa	1,747,754,649	1,233,372,935	41.71
Belanja barang persediaan	180,058,963	437,897,832	(58.88)
Belanja Pemeliharaan	257,250,700	258,370,777	(0.43)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8,284,591,710	5,685,127,358	45.72
Jumlah Belanja Kotor	**13,341,644,508**	**10,513,131,434**	**26.90**
Pengembalian Belanja	7,618,655	862,230	**783.60**
Jumlah Belanja	**13,334,025,853**	**10,512,269,204**	**26.84**

Inspektorat Utama Badan POM mengalokasikan belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp293.592.000,00 Anggaran tersebut terserap sebesar Rp293.547.435,00 dan telah menggunakan akun khusus Covid-19, dengan rincian sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 14.

Rincian Alokasi Belanja Barang Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	158,352,000.00	158,319,515.00	99.98
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	135,240,000.00	135,227,920.00	99.99
Jumlah Belanja Bruto		293,592,000.00	293,547,435.00	99.98
	Pengembalian belanja		0	0
Jumlah Belanja Netto		**293,592,000.00**	**293,547,435.00**	**99.98**

Tabel 15.
Rincian Pagu Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2022

KODE OUTPUT	KODE KOMPONEN	KODE SUB KOMPONEN	AKUN	URAIAN AKUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN	Keterangan
4115.EAK.001 Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I yang sesuai standar mutu	057 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I	C. Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiata	521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	65.435.000	65.404.169	99.95 %	Untuk pembelian masker, hand sanitizer, dan biaya isoman
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid -19	54.218.000	54.217.600	100%	Untuk pelaksanaan swab, pcr dan antigen
	058 Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	Q. Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN (IKSP 18)	521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	41.624.000	41.622.347	100%	Untuk pembelian masker, hand sanitizer, dan biaya isoman
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid -19	27.087.000	27.077.000	99.96%	Untuk pelaksanaan swab, pcr dan antigen
4116.EBD.001 Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II yang sesuai standar mutu	077 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern lingkup Inspektorat II	D. Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	51,293,000	51.292.999	100%	Untuk pembelian masker, hand sanitizer, dan biaya isoman
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid -19	53.935.000	53.933.320	100%	Untuk pelaksanaan swab, pcr dan antigen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jumlah Belanja Netto	**293.592.000**	**293.547.435**	**99.98%**	

Akun belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 digunakan untuk pembelian pulsa/paket data pegawai, Biaya Penginapan Isolasi Mandiri, Masker, Faceshield, Hand Sanitizer, Oximeter dan Langganan Zoom Meeting serta jasa penanganan kesehatan (swab dan rapid test Covid-19).

Belanja Modal Rp744.727.250,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp744.727.250,00 dan Rp434.946.465,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami penurunan sebesar 71.22% dibandingkan TA 2021. Hal disebabkan anggaran belanja modal menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel 16.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan & Mesin	556,561,000	326,206,904	70.6
Belanja Modal Lainnya	188,166,250	108,739,561	73.0
Jumlah Belanja Kotor	**744,727,250**	**434,946,465**	71.2
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**744,727,250**	**434,946,465**	**71.22**

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp556.561.000,00 dan Rp326.206.904,00 mengalami kenaikan sebesar 71,22% dibandingkan realisasi TA 2022 Hal ini disebabkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin meningkat dari tahun sebelumnya karena meningkatnya kebutuhan organisasi.

Realisasi belanja peralatan dan mesin dirinci sebagai berikut:

Tabel 17.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Intrakom			
Alat kantor	10,770,000	34,580,230	-68.86
Alat Rumah Tangga	0	10,537,644	-100.00
Alat Studio	37,200,000	1,899,000	1858.93
Komputer Unit	486,129,000	246,444,030	97.26
Peralatan Komputer	22,462,000	32,746,000	-31.41
Jumlah Belanja Kotor Intrakom	**556,561,000**	**326,206,904**	**70.62**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**556,561,000**	**326,206,904**	**70.62**

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp188.166.250,00 dan Rp39.600.000,00. Belanja modal lainnya ini terdiri dari akun Belanja Modal Lainnya dan Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya. Rincian Belanja modal lainnya dan Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya untuk aplikasi yang sudah ada yaitu :

Belanja Modal Lainnya				
No.	**Nama Barang**	**Jumlah Unit**	**Jumlah Rupiah**	**SPM No /Tanggal**
1	Pembangunan Aplikasi E-Monev RB	1 Unit	22.498.750	SPM-433005-104841983/ 28 Oktober 2022

Tabel 18.

Rincian Belanja Modal Lainnya

Tabel 19.

Rincian Belanja Penambahan Nilai Asset Tetap Lainnya

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya				
No.	**Nama Barang**	**Jumlah Unit**	**Jumlah Rupiah**	**SPM No /Tanggal**
1	Pengembangan Aplikasi SOLUSI	1	91.020.000	SPM-433005-75542930/ 8 Agustus 2022
2	Pengembangan Aplikasi SAPA APIP	1	74.647.500	SPM-433005-125521572/ 19 Desember 2022
Jumlah			165.677.500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp123.308.057,00

C1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Inspektorat Utama Badan POM per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp123.308.057,00 dan Rp 165.261.187,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan
Rp123.308.057,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp123.308.057,00 dan Rp165.261.187,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	TA 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	123,308,057	165,261,187
Jumlah	**123,308,057**	**165,261,187**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Sesuai Berita Acara (BA) Stok Opname Nomor PL.03.01.73.732.01.23.07 tanggal 31 Desember 2022.

Rincian Persediaan masing-masing Eselon I disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp4.789.772.178,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah 4.789.772.178,00 dan Rp4.252.247.594,00. Mutasi nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 21

Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**4,252,247,594.00**
Mutasi tambah:	
Pembelian	556,561,000.00
Reklasifikasi Masuk	985,000.00
Transfer Masuk	231,394,260.00
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	(250,430,676)
Reklasifikasi Keluar	(985,000)
Transfer Keluar	
Saldo per 31 Desember 2022	**4,789,772,178.00**
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2022	3,444,796,850.00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**1,344,975,328.00**

Mutasi transaski penambahan peralatan dan Mesin berupa :

1. Pembelian senilai Rp556.561.000,00 dengan perincian:

Tabel 22. Daftar Pembelian

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah	SP2D No /Tanggal
1	Video Conference	2 Unit	Rp37,200,000.00	SPM-43300 42167550/ Mei 2022
2	Oven Listri	1 Unit	Rp985,000.00	SPM-43300 116397341/ November 20
3	Mesin Penghitung Uang	2 Unit	Rp6,500,000.00	SPM-43300 112071690 / November 20
4	Printer	2 Unit	Rp16,462,000.00	SPM-43300 42167550/ Mei 2022
5	PC Unit	5 Unit	Rp71,350,000.00	SPM-43300 32598417/ April 2022
6	PC All in One	2 Unit	Rp38,700,000.00	SPM-43300 117853548 Desember 20
7	Notebook	24 Unit	Rp376,079,000.00	SPM-43300 32598417/ April 2022
8	Pointer	1 Unit	Rp1,070,000.00	SPM-43300 122717192/ Desember 20
9	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Rp3,200,000.00	SPM-43300 42167550 / Mei 2022
10	Scanner	1 Unit	Rp6,000,000.00	SPM-43300 42167550 / Mei 2022
Jumlah			**Rp557,546,000.00**	

2. Reklasifikasi Masuk dan Keluar :

Terdapat reklasifikasi masuk dan keluar karena kodefikasi aset berupa 1 unit Microwave Oven senilai Rp985.000,00 dengan perincian sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berikut :

Tabel 23. Daftar Reklasifikasi dan Keluar

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah	No /Tanggal
1	Microwave Oven	1 Unit	Rp985,000.00	PL.03.01.73.732.01.23.03 tanggal 30 Desember 2022
Jumlah			**Rp985,000.00**	

3. Transfer Masuk :

Terdapat transfer masuk dari Sekretariat Utama dan Pusat Data dan Informasi berupa 44 Unit Meja Kerja Kayu senilai Rp203.960.250, 1 Unit Meja Rapat senilai Rp7.437.000,00, 19 Unit Screen Pembatas senilai Rp9.405.000,00 dan 1 unit Laptop senilai Rp19.997.010,00 dengan perincian :

Tabel 23. Daftar Transfer Masuk

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah	No /Tangga
1	Peralatan & Mesin	44 Unit	Rp211,397,250.00	PL.03.01.25.2 .11.22.815 Tanggal 3 November 20
2	Laptop	1 Unit	Rp19,997,010.00	PL.03.07.8.8 9.22.120 Tanggal 28 September 20
Akumulasi Penyusutan			Rp20,839,376.00	
Jumlah			**Rp210,554,884.00**	

Mutasi kurang peralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2022 terdiri dari :

1. Penghentian aset berupa BMN kondisi rusak berat senilai Rp250.430.676.00,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 24. Daftar Mutasi Kurang Peralatan

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah rupiah
1	Notebook	14	165,169,000
2	Meja Kerja Kayu	7	80,850,500
3	Workstation	1	4,411,176
Jumlah		**22**	**250,430,676**

2. Tidak terdapat reklasifkasi keluar.

C.3 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Aset Tetap Lainnya Rp12.389.250

dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp12.389.250,00 dan Rp12.389.250,00. Aset tetap tersebut berupa buku pustaka. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25

Rincian mutasi tambah dan kurang atas Aset tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**12,389,250**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2022	**12,389,250**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**12,389,250**

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.3.444.796.850,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp3.444.796.850,00 danRp3.039.666.619,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,801,581,359	3,446,218,868	1,355,362,491
2	Aset Tetap Lainnya	12,389,250	0	12,389,250
Akumulasi Penyusutan		**4,813,970,609**	**3,446,218,868**	**1,367,751,741**

C.7 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp896.735.811,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp896.735.811,00 dan Rp708.569.561,00.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp708,569,561
Mutasi tambah:	Rp188,166,250
Pembelian	Rp22,498,750
Pengembangan	Rp165,667,500
Mutasi kurang:	
Pemusnahan	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp896,735,811
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(730,351,376)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp166,384,435

Mutasi tambah berupa pengembangan aset dengan perincian:

Tabel 28. Pembangunan Aplikasi

No	Nama Barang	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit	No dan Tanggal SP2D
1	Pembangunan Aplikasi E-Monev RB	1 Unit	Rp22.498.750,00	SPM-433005-104841983/ Tanggal 28 Oktober 2022

Tabel 29. Pengembangan Aplikasi

No	Nama Barang	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit	No dan Tanggal SP2D
1	Pengembangan Aplikasi SOLUSI	1 UNIT	Rp91.020.000,00	SPM-433005-75542930/ Tanggal 8 Agustus 2022
2	Pengembangan Aplikasi SAPA APIP	1 Unit	Rp74.647.500,00	SPM-433005-125521572/ Tanggal 19 Desember 2022

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30.

Rincian Aset Tak berwujud TA 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Uraian	Nilai Perolehan
1	Aplikasi SAPA APIP, semula bernama SIMOLEKDES(yang digunakan untuk database pengawasan intern	401.039.500,00
2	Aplikasi GIAT Online yang digunakan untuk Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Utama BPOM	94.380.000,00
3	Aplikasi SOLUSI yang digunakan sebagai media untuk layanan konsultasi bagi mitra pengawasan dengan auditor Inspektorat Utama;	240.217.561,00
4	Aplikasi INSPIRING AUDIT, semula bernama SITAMPAN ADI SIMWAS, yang merupakan sistem elektronik dan terintegrasi mulai dari tahapan perencanaan audit berbasis resiko, penugasan audit, pelaksanaan audit, perumusan rekomendasi hingga pelaporan hasil audit	138.600.000,00
5	Aplikasi E-MONEV RB adalah yang membantu dalam monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RB di Badan POM agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map RB dapat berjalan sesuai jadwal, target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.	22.498.750,00
	Jumlah	**896.735.811,00**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp730.351.376,00

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp730.351.376,00 dan Rp424.570.129,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	896,735,811	730,351,376	166,384,435
Jumlah	896,735,811	730,351,376	166,384,435
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**896.735.811**	**730.351.376**	**166.384.435**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp2.890.118,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.890.118,00 dan Rp29.320.688,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah :

Tabel 32

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Kekurangan lembur PNS bulan November 2022	Rp.1.841.000,00	Tidak tersedia anggaran
Kekurangan Kenaikan Gaji Berkala bulan Desember 2022	Rp. 1.049.118,00	Belum dibayarkan menunggu SK KGB
Jumlah	Rp.2.890.118,00	

Ekuitas
Rp1.644.166.952,00

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.644.166.952,00 dan Rp1.644.910.156,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp1.312.000,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.312.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 33

Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Uraian	No SP2D	Tanggal Setor	Jumlah
1	Keleterlambatan atas pekerjaan kontrak Pengembangan Aplikasi SOLUSI	221751302024346	08/08/2022	1.312.000
	Jumlah			1.312.000

Beban Pegawai
Rp10.840.743.241,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.840.743.241,00 dan Rp9.078.541.952,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 34
Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,327,486,600	2,881,697,860	15.4
Beban Pembulatan Gaji PNS	59,393	46,806	26.8
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	156,633,590	169,485,660	(7.5
Beban Tunj. Anak PNS	41,648,430	37,750,734	10.3
Beban Tunj Struktural PNS	150,470,300	197,670,000	(23.8
Beban Tunj Fungsionall PNS	460,205,000	340,110,000	35.3
Beban Tunj PPH PNS	24,198,878	26,680,338	(9.3
Beban Tunj. Beras PNS	161,931,120	144,622,740	11.9
Beban Uang Makan PNS	493,999,000	463,556,000	6.5
Beban Tunj Umum PNS	55,125,000	45,905,000	20.0
Beban Lembur	23,241,000	33,117,000	(29.8
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	5,945,744,930	4,737,899,814	25.4
Jumlah	**10,840,743,241**	**9,078,541,952**	**19.4**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp222.012.093,00

Jumlah Beban Persediaan tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp222.012.093,00 dan Rp380.363.739,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 35

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	222,012,093	380,363,739	(42)
Jumlah	**222,012,093**	**380,363,739**	(42)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp4.619.743.135,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.619.743.135,00 dan Rp4.158.945.346,00. Beban

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAI (TURU %
Beban Keperluan perkantoran	1,662,454,429	1,282,742,358	29
Beban Penambah daya tahan tubuh	0	77,625,155	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	4,727,667	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	188,388,000	211,500,000	(10.
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	156,424,172	537,519,954	(70.
Beban bahan	375,018,121	560,219,815	(33.
Beban Honor output kegiatan	14,090,000	2,650,000	431
Beban Barang Non Operasional Lainnya	473,209,583	222,203,900	112
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,404,181	0	0
Beban Jasa Konsultan	85,000,000	0	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	562,210	0
Beban Sewa	804,051,649	323,212,922	148
Beban Jasa Profesi	227,200,000	272,599,600	(16.
Beban Jasa Lainnya	496,275,080	340,601,300	45
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	135,227,920	322,780,465	(58
Jumlah	**4,619,743,135**	**4,158,945,346**	11

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp257.250.700,00

Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp257.250.700,00 dan Rp258.370.777,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	257,250,700	258,370,777	(0.43
Jumlah	**257,250,700**	**258,370,777**	(0.43

Beban Perjalanan Dinas Rp8.276.973.055,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.276.973.055,00 dan Rp5.684.265.128,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4,783,556,323	4,289,200,275	11.53
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	88,139,840	85,850,000	2.67
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	709,661,240	312,606,000	127.01
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,695,615,652	996,608,853	170.48
Jumlah	**8,276,973,055**	**5,684,265,128**	**45.61**

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp940.502.778,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp940.502.778,00 dan Rp726.511.573,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	634,721,531	554,730,421	14.42
Jumlah Beban Penyusutan	**634,721,531**	**554,730,421**	14.42
Beban Amortisasi Software	305,781,247	170,129,652	79.73
Jumlah Beban Amortisasi	**305,781,247**	**170,129,652**	79.73
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam operasional Pemerintah	**-**	**1,651,500**	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**940,502,778**	**724,860,073**	29.75

D.8 Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Surplus Non Operasional Rp42.845.735,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	42,086,701	4,555,555	823.85
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	13,356,000	(100.00)
Jumlah Surplus /(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**42,086,701**	**(8,800,445)**	(578.23)
SURPLUS/DEFISITDARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	759,034	2,201,191	(65.52)
Bebadn dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Surplus /(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Linnya	**759,034**	**2,201,191**	(65.52)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**42,845,735**	**(6,599,254)**	(749.25)

Penjelasan dari kegiatan non operasional sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp42.086.701,00 merupakan transaksi Pendapatan dari BMN Lainnya, dengan rincian sebagi berikut
    a) Penerimaan dari pelepasan aset non lancar berupa lelang BMN senilai Rp19.000.000,00 dengan NTPN no.82F4F3CIF1A42NQV tanggal 4 Febuari 2022. Lelang BMN ini berupa 1 paker barang inventaris kantor yang terdiri dari Mesin Ketik, Alat Penghancur Kertas, Binding Machine, Slide

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Projector, Intermediate Telephone, Pesawat Telephone, PC, Notebook, Printer, Scanner, dan Hardisk Eksternal

b) Penerimaan dari pelepasan aset non lancer berupa lelang BMN senilai Rp23.086.701,00 dengan NTPN no.5EEF20N9VIGMFV90 tanggal 2 Desember 2022. Lelang BMN ini berupa 1 paket barang kantor yang terdiri dari Notebook, Workstation, dan Meja Kayu.

2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp759.034,00 merupakan transaksi Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42

Rincian Pengembalian Belanja Pegawai

No	Uraian	No NTPN/No. SPM	Tanggal Setor	Jumlah
1	Pengembalian Tukin Bulan Desember 2021	4A68E7QLU635V0G2	07/01/2022	161.228
2	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2021	6F72A3CIF177TV4F	07/01/2022	597.100
3	Pembulatan Untuk Kekurangan Gaji Bulan Oktober sd November Tahun 2021	SPM-433005-18135495	14/01/2022	228
4	Pembulatan untuk Kekurangan Gaji Induk Bulan Desember Tahun 2021 sd Februari Tahun 2022	SPM-433005-24686138	01/03/2022	478
	Jumlah			759.034

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.644.910.156,00 dan Rp1.938.805.227,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rp1.644.910.156,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Rp25.113.067.267,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp25.113.067.267,00 dan Rp20.293.597.769,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi Rp0,00

Koreksi atas reklasifikasi persediaan/Aset tetap/Aset lainnya merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Selisih atas reklasifikasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp354.856,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp0,00

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Koreksi Lain-Lain Rp0,00

dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp25.112.324.063,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp25,112,324,063 dan Rp20.000.057.554,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 43

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	24,945,926,914
Diterima dari Entitas Lain	(44,157,735)
Transfer Masuk	210,554,884
Jumlah	**25.112.324.063**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan. Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp44.157.735,00. Rincian Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode hingga 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 45

Rincian Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	MAP		Uraian	Realisasi
1	4251	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	42,086,701
2	4,258	425,811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,312,000.00
3	4259	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	759,034.00
Jumlah Kotor				**44,157,735.00**
Pengembalian Pendapatan				-
Pendapatan Bersih				**44,157,735.00**

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp24.945.926.914,00. Rincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL) untuk periode hingga 31 Desember 2022 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 46

Rincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL)

Uraian	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Belanja Pegawai	10,867,173,811.00
Belanja Barang	13,334,025,853.00
Belanja Modal	744,727,250.00
Jumlah	**Rp 24,945,926,914**

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Tidak terdapat transfer keluar.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk yang mempengaruhi Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp210.554.884,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 47

Rincian Transfer Masuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah	No /Tangga
1	Peralatan & Mesin	44 Unit	Rp211,397,250.00	PL.03.01.25.2 .11.22.815 Tanggal 3 November 20
2	Laptop	1 Unit	Rp19,997,010.00	PL.03.07.8.8 9.22.120 Tanggal 28 September 20
Akumulasi Penyusutan			Rp20,839,376.00	
Jumlah			**Rp210,554,884.00**	

Ekuitas Akhir
Rp1.644.166.952,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.644.166.952,00 dan Rp1.644.910.156,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Inspektorat Utama memiliki Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan rincian sebagai berikut:

No	No Rekening	Nama Bank	Kode Rekeneing
1.	9890314330051000	BNI KCU Kramat	20
2.	9890314330051001	BNI KCU Kramat	21
3.	9890314330051002	BNI KCU Kramat	21
4.	9890314330051003	BNI KCU Kramat	21

- Pada tanggal 18 Januari 2022 Pejabat pengelola Keuangan untuk Bendahara Pengeluaran mengalami pergantian semula Nina Melynda D, SE menjadi Dodi Widianto, SAP dengan perincian :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tahun	Semula		Menjadi	
	Nama Bendahara	Nomor dan Tanggal SK	Nama Bendahara	Nomor dan Tanggal SK
2022	Dodi Widianto, SAP	HK.04.03.72.732.01.21.01 Tanggal 18 Januari 2022	Rizki Faiza Ismaningrum, A.Md	HK.02.02.7.73.04.22.16 Tanggal 19 April Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN